

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor UMKM juga menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Lubis dan Santoso (2013) peran industri kecil memiliki peran positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, sektor UMKM juga memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi. Hal ini dibuktikan pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, ketika banyak perusahaan besar yang gulung tikar justru sektor UMKM masih mampu bertahan dengan kondisi tersebut.

Pasar persaingan yang dihadapi UMKM saat ini tidak hanya sebatas pasar antar kabupaten atau antar propinsi saja, tetapi juga sudah menembus pasar antar negara . Hal ini ditandai dengan adanya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang diresmikan per 31 Desember 2015. MEA merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM. Suryana (2013:99) dengan adanya tantangan seorang wirausahawan akan berpikir kreatif dan berusaha inovatif. Proses kreatif inilah yang oleh Suryana (2013:99) dalam Zimmer (1996) didefinisikan sebagai “berpikir sesuatu yang baru (thinking new things)”. Adanya tantangan tersebut, para pelaku UMKM diharapkan mampu berpikir lebih

kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha yang dijalankan sehingga mampu bersaing, bukan hanya negara- negara di ASEAN tetapi juga dengan bersaing dengan negara lain di dunia. Pelaku UMKM yang menghadapi persaingan pasar yang semakin tinggi harus melakukan sebuah inovasi yang kreatif agar mampu bertahan dalam melanjutkan usahanya, karena UMKM tersebut mungkin tidak bertahan dalam keberlangsungan usahanya. Keberhasilan menghadapi MEA, kerjasama antara pihak-pihak yang terkait baik pihak pelaku UMKM, pemerintah, perbankan dan pihak swasta merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan.

Pemerintah tidak angkat tangan dalam mengembangkan UMKM, karena peran pemerintah dalam pengembangan UMKM telah tercantum dalam UU No 20 tahun 2008 secara singkat diatur dalam pasal 7, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Pihak swasta juga memiliki peran dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), beberapa perusahaan menjalankan perannya dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung atau dan tidak langsung dari kegiatan perusahaan. Bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak perusahaan adalah dengan pemberian pinjaman dana bergulir

dan pembinaan dalam bentuk seminar atau sosialisasi dalam mengembangkan usahanya.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus . Berdasarkan data dari Gresik Dalam Angka (GDA) 2014 menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah penerbitan Surat Ijin Industri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerbitan Surat Ijin Industri**

Jenis Surat Ijin (SIUP)	Tahun		
	2011	2012	2013
Kecil ( <i>small</i> )	738	753	799
Menengah ( <i>medium</i> )	166	185	170
Besar ( <i>large</i> )	69	52	19

Sumber : Gresik Dalam Angka (2014)

Potensi ekonomi, tidak hanya berasal dari sektor Industri perusahaan besar tetapi sektor UMKM juga menjadi salah satu penyokong ekonomi di kabupaten ini. Sebagai salah satu potensi yang dimiliki kabupaten Gresik, UMKM terus mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah, perbankan atau swasta. Hal ini bertujuan agar UMKM terus berkembang dan mampu menjadi lembaga ekonomi yang bagus dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Terkait dengan pengembangan usaha, sebagian besar pelaku UMKM pasti akan mengalami beberapa kendala yang akan menghambat potensi keberhasilan usaha. Beberapa potensi yang membuat seseorang tidak melanjutkan usahanya adalah pendapatan yang tidak menentu, kerugian akibat hilangnya modal, perlu

kerja keras dan waktu yang lama dan kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya telah berhasil Suryana (2014) dalam Zimmere (1996:17). Mewujudkan suatu keberhasilan suatu usaha tidak hanya berasal dari ide kreatif dan inovatif saja. Suryana (2014) dalam Steinhoff & Burgess (1993) menyatakan bila ingin sukses harus membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan, dan menjalankannya.

Melihat kondisi dan permasalahan tersebut, pada tahun 2009 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar yang dapat digunakan bagi pelaku UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP). Entitas yang dimaksudkan adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Menurut Masitho dan Rachmi (2014:2) Kehadiran SAK ETAP diharapkan dapat membantu dan mempermudah UMKM mendapatkan akses permodalan di perbankan. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat, karena penyusunan laporan keuangan menurut SAK ETAP mencakup beberapa karakteristik kualitatif yang ada pada di laporan keuangan menurut SAK ETAP. Akan tetapi, penerapan SAK ETAP tidak begitu saja dapat diterima oleh UMKM tidak terkecuali oleh UMKM Mitra Binaan. Masih banyak UMKM yang tidak menerapkan pembukuan yang sesuai standar (Tuti, 2015).

Fenomena yang terjadi pada UMKM adalah kurangnya perhatian para pelaku usaha dalam membuat perencanaan, terutama dalam perencanaan keuangan.. Minimnya pengetahuan tentang laporan keuangan menurut akuntansi juga menjadi salah satu penyebab membuat banyak pelaku UMKM yang tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Menurut pengakuan beberapa pelaku UMKM Mitra Binaan, tidak semua pihak mitra mewajibkan pelaku UMKM membuat laporan keuangan. Namun ada juga pihak mitra yang meminta laporan keuangan setiap triwulan. Namun, realita yang terjadi, banyak dari UMKM binaan yang tidak membuat laporan keuangan dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki diantaranya keterbatasan pengetahuan serta persepsi bahwa laporan keuangan tidak sesuai dan bahkan mempersulit jika diterapkan bagi usaha mereka. Sehingga pihak mitra tidak dapat memaksakan kewajiban mengumpulkan laporan keuangan karena keterbatasan tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu faktor pelaku UMKM sering mengabaikan pengelolaan keuangan. Asumsi lain dari pelaku UMKM juga ada yang beranggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Namun, dalam kenyatannya, pengelolaan keuangan UKM membutuhkan keterampilan akuntansi yang baik oleh pelaku bisnis UKM (Putu, 2015:13).

Sejak SAK ETAP berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011, persepsi dari berbagai pihak muncul. Persepsi tersebut sebagai bentuk tanggapan atas tingkat efektifitas, efisiensi, tingkat kemudahan maupun kegunaan

(kebermanfaatan) adanya standar yang baru. Pada dasarnya, sebuah perubahan sistem yang mampu memberikan kegunaan pada penggunanya maka sistem tersebut akan diterima dengan baik dan begitu pula sebaliknya, apabila sistem tersebut tidak bermanfaat atau menyulitkan maka akan ditinggalkan oleh penggunanya (Putu, 2015 dalam Robbins, 2002). Penelitian mengenai persepsi pelaku UMKM atas implementasi SAK ETAP merupakan salah satu bentuk upaya, agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan informasi akuntansi dengan menggunakan standar yang telah ditentukan dan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk keberlangsungan UMKM tersebut. Putu (2015) dalam Fitakurrokkmah (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dalam penggunaan SAK ETAP oleh BPR di Malang Raya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil judul Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Atas Implementasi SAK ETAP Pada Laporan Keuangan UMKM (UMKM Mitra Binaan Di Gresik).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah laporan keuangan yang diterapkan pelaku UMKM sudah sesuai dengan SAK ETAP ?

2. Bagaimana persepsi pelaku UMKM atas penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan kegiatan usaha mereka ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dalam penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan yang sudah disusun dengan SAK ETAP.
2. Untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM atas penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan dalam kegiatan usaha mereka.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), hasil penelitian diharapkan dapat lebih memotivasi pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) untuk dapat menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP).
2. Bagi pihak Pemerintah dan CSR Perusahaan, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk dapat menganalisis lebih lanjut mengenai pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK- ETAP.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hanum (2013:02) dengan judul Pengaruh Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Keberhasilan Perusahaan (Survei Pada Usaha- Usaha Kecil Di Kota Medan) meneliti mengenai apakah ada pengaruh positif antara proses belajar motivasi, dan kepribadian terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi keuangan dan apakah terdapat pengaruh positif antara persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi terhadap keberhasilan perusahaan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian selanjutnya adalah Pratiwi, dkk (2014:03) dalam penelitiannya berjudul Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT Nichindo Manado Suisan melihat pentingnya dari segi kegunaan, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku agar dapat diinterpretasikan dengan konsep dan pemahaman yang sama oleh para penggunanya.

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti- peneliti terdahulu adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan menggunakan metode kuantitatif.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM Mitra Binaan yang ada di Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM atas implementasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.